

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat

By M. Syamsudin

kreasi bervisi demi negeri

EXAMInasi

Edisi 1 Tahun 2011

Terbit Sejak 10 November 2011

Produk: INDIRIZOR, SH

PENERBIT

Centralex Pembangunan Muka Ekonomi dan

Keberlanjutan (LAKEX)

200822/14/0010

Centralex Binaan Muka Perumahan Terwujud Negeri

LAKEX PRTS

ALAMAT: REDANS

2021 Rawangangin Nomor 32

Jakarta Pusat

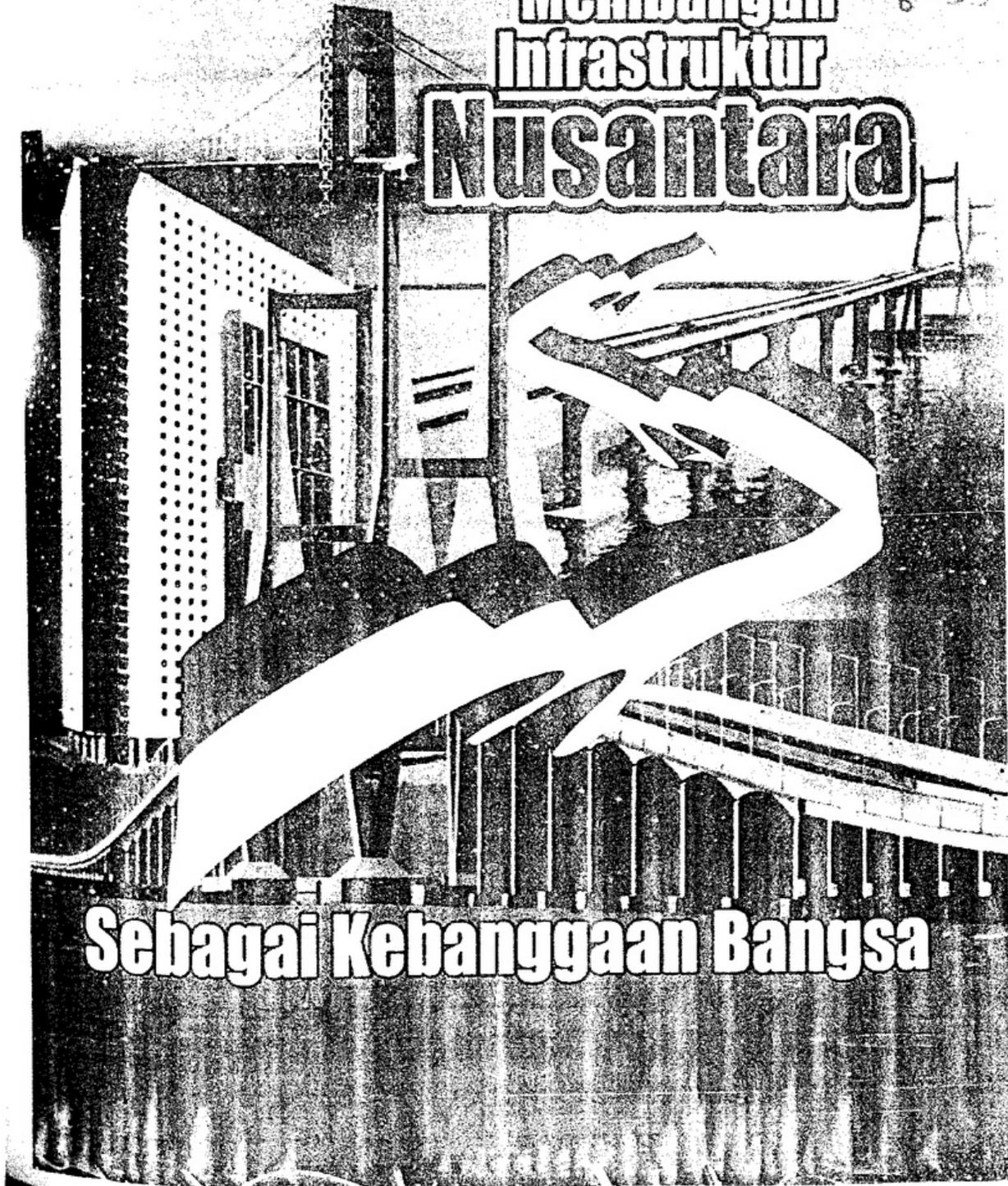
Telepon: 021-4202446

Membangun Infrastruktur

B-33

Nusantara

Sebagai Kebanggaan Bangsa



4

Cari orang, tempat dan hal lainnya

**EXAMOpini: Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat**

oleh Examinasi (Tabloid Hukum) (Catatan) pada 22 November 2011 pukul 9:51

Banyak sekali definisi dari para ahli yang berupaya menjelaskan tentang makna korupsi dengan sudut pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama, sosial-budaya dan hukum. Dari perspektif apapun, korupsi dengan segala bentuk dan modus operandinya, dimaknai sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama dan hukum. Tak ada tempat bagi perbuatan korupsi. Para ahli pada umumnya memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Istilah 'korupsi' berasal dari sebuah kata di dalam bahasa Inggris 'corruption', yang berasal dari kata dalam bahasa Latin 'corruptus' yang berarti "merusak habis-habisan". Kata 'corruptus' itu sendiri berasal dari kata dasar corrumpere, yang tersusun dari kata com (yang berarti 'menyeluruh') dan 'rumpere' yang berarti 'merusak' atau 'menghancurkan'. Dalam artinya yang harfiah, 'korupsi' dapat diartikan sebagai 'ulah laku amat tidak jujur yang akan merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu, yang bahkan juga akan bisa merusak seluruh sendi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ada'.

Robert Klitgaard misalnya, memaknai korupsi sebagai fungsi dari monopoli ditambah kewenangan dikurangi akuntabilitas. Jadi korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan serta tidak terdapat mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Korupsi dapat terjadi baik di sektor publik, swasta, maupun bidang nirlaba, apabila seseorang memonopoli kekuasaan baik atas barang maupun pelayanan, dalam menerima maupun mendapatkan tanpa akuntabilitas.

Di Indonesia, korupsi telah diartikan secara khusus sebagai ulah laku tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang pejabat dalam hal penggunaan dana keuangan yang seharusnya didayagunakan untuk kepentingan publik. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang akan menyebabkan kepentingan khalayak ramai tak lagi terlayani, karena dana yang dimaksud telah digunakan untuk memenuhi kepentingan para pejabat itu sendiri.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi pandemi yakni wabah atau penyakit yang sulit sekali diberantas. Sebagian lagi berpendapat bahwa korupsi memang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Korupsi itu sudah masuk secara meluas dan mendalam dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat. Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus Akte Kelahiran, Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan/lelang di instansi-instansi pemerintah dan bahkan sudah masuk dalam lingkungan penegakan hukum sendiri, yakni dengan adanya mafia peradilan (judicial corruption).

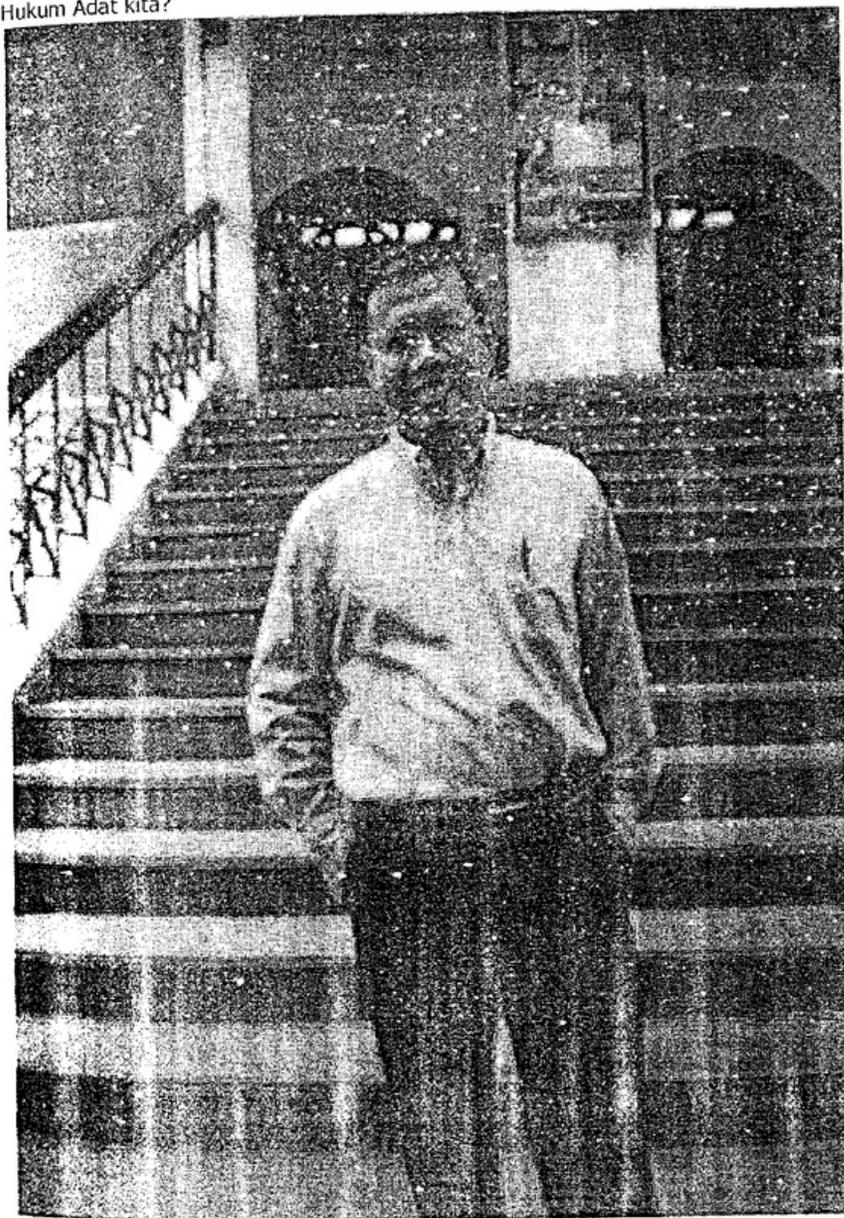
Tanpa disadari pula, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah (gratifikasi) dan suap kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Praktik korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Dalam ungkapan M. Hatta, korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa.

Dalam bidang keagamaan, ada pula beberapa model korupsi yang sangat terkait dengan money politics seperti: pemberian uang syahriyah, pemberian bisyarah dari orang yang punya kepentingan kepada tokoh agama, jariah pembangunan pesantren atau sarana ibadah yang sarat dengan muatan politik.

Obrolan (Mati)

4

perempuan, korupsi sosial ala Robin Hood yakni pengambilan uang negara di luar anggaran yang resmi (illegal) untuk kemudian didistribusikan lagi pada jalan kebaikan, seperti pembangunan pesantren, masjid, dan madrasah baik miliknya atau milik orang lain yang mempunyai relasi dengannya. Dalam perspektif demikian, walaupun pada akhirnya dapat dibuktikan legalitasnya, korupsi sebenarnya bukanlah korupsi, melainkan mempunyai makna lain seperti komisi, kompensasi, hadiah, insentif, return fee, tali asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa. Jika Hukum Adat dimaknai sebagai endapan dari nilai-nilai budaya masyarakat yang termanifestasikan dalam pola laku kita sehari-hari lantas dapatkah dimaknai bahwa korupsi itu merupakan bagian dari Hukum Adat kita?



M. Svamsuddin

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1 **bandung.go.id**
Internet

12 words — 2%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Lektor Kepala (700 AK)

Pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005	7%	
2	Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723 Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005	0%	
3	Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008	0%	
4	Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031, Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006	0%	
5	Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008	0%	
6	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010	6%	
7	Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797 Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201	0%	

8	Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498 Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008	2%	
9	Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012	0%	
10	Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919 Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011	0%	
11	Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6	0%	
12	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFAS European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275	0%	
13	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646	0%	
14	Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031	0%	
15	Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955	2%	
16	Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714	0%	
17	Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia	3%	
18	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498	4%	

19	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506	0%	
20	Prosiding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning in Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5	0%	
21	Prosiding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases	0%	
22	Prosiding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;	18%	
23	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590	3%	
24	Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4	0%	
25	Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2	0%	
26	Makalah Seminar Internasional Non Prossiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIAS) , pada Desember 2008 .	0%	
27	Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,	2%	
28	Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0	8%	
29	Jurnal Nasional Terakreditasi: Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.1, April 2017, berjudul: An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in Business Transactions, ISSN: 2442-9880	5%	

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Rektor



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Wakil Rektor I

Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI.